

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Y., Setyasih, I., & Herlan. (2021). Partisipasi masyarakat terhadap penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat, Kecamatan Samarinda Seberang. *Journal Of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 45-58.
- Azis, I. P. A., & Giriwati, N. S. S. (2024). Peranan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Kotalama, Kota Malang. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 13(3), 123-135.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2022*.
- Buku Data PKPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. (2022). Semarang: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
- Bumberger, M., & Shams, A. (1989). Pendekatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 12(3), 45-60.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). Participatory development: A theoretical framework. In J. M. Cohen & N. T. Uphoff (Eds.), *Participation in development: A review of the literature* (pp. 1-25). New York: United Nations.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Djodding, I. M. (2020). Partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Tesis*. Universitas Hasanuddin.
- Hamdani, Naufal Fikri. (2024). Analisis Perencanaan dan Penganggaran DAK Fisik TA 2022 Integrasi Bidang Perumahan dan Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi dalam Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Studi Kasus Kabupaten Semarang. *Skripsi*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Huraerah, E. (2008). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan: Konsep dan implementasi. *Jurnal Pembangunan*, 10(1), 95-110.
- Juita Tanggu Solo, Y., & Adiwidjaja, I. (2018). Partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh di Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(3), 201-215.

- Khatima Tusya'dah. (2017). Tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan kualitas permukiman kumuh Kelurahan Bareng, Kota Malang. *Skripsi*. Institut Teknologi Nasional Malang.
- Laporan Akhir Konsolidasi Tanah Desa Penawangan. (2022). Kabupaten Semarang: Badan Pertanahan Nasional.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mubyarto. (1997). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yogyakarta: Andi.
- Nabila, F., Fuady, Z., & Aulia, F. (2023). Bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat pada program penanganan permukiman kumuh di Gampong Seutui. *Jurnal Arsitektur dan Perencanaan*, 12(1), 67-80.
- Ndraha, T. (1987). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Boston: Pearson.
- Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kepengurusan, dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Bidang Pekerjaan Umum.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)
- Pretty, J. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247-1263.
- Rorong, M., Suroso, A., & Rahman, F. (2017). Analisis partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 8(2), 200-215.
- Rozaki, Ahmad. (2019). Peta administrasi Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Dalam <https://neededthing.blogspot.com/2019/06/peta-administrasi-kecamatan-pringapus.html>. Diunduh pada 31 Oktober 2025
- Slamet, A. (2003). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan*. Jakarta: Universitas.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 16/SE/DC/2020 tentang Standar Teknis Jalan pada Permukiman.
- Surat Keputusan Bupati Nomor 050/0473/2020 tentang Penetapan Lokasi Kumuh
- Surat Keputusan Kepala Desa Penawangan Nomor 140/06.07/IV/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal
- Surat Keputusan Kepala Desa Penawangan Nomor 140/06.08/IV/2022 tentang Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) IPAL Komunal
- Surat Keputusan Kepala Desa Penawangan Nomor 140/07.00/IV/2022 tentang Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) TPS 3R
- Surat Keputusan Kepala Desa Penawangan Nomor 140/07.01/IV/2022 tentang Kelompok Pengelola dan Pemanfaat (KPP) TPS3R Wana Sehat
- Surat Keputusan Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah Bupati Semarang Nomor 600/0404/2021
- Suroso, Hadi., dkk. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 17(1).
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah